

KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN INDRAMAYU, PROVINSI JAWA BARAT

Arba'in Tsururi

NPP. 30.0523

Asdaf Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Program Studi Adminisrasi Pemerintahan Daerah

Email: arbaintsururii@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This research focuses more on the implementation of the performance of the Environmental Service in Waste Management in Indramayu District, West Java Province.s. **Purpose:** This study aims to determine the performance of the Environmental Service in waste management, find out the obstacles that occur, and efforts to overcome these obstacles. **Method:** In this study the authors used a type of qualitative research descriptive method and inductive approach. Data collection methods used by conducting interviews, direct observation, and documentation. **Result:** The writer finds that the performance of the Environmental Service in Waste Management is considered not good because there are several external and internal inhibiting factors faced by the Indramayu Regency Environmental Service. **Conclusion:** The obstacles he experienced were the large amount of waste generated, limited facilities and infrastructure, low employee competence, not yet having effective technology in waste management, a minimal budget because it was considered not a priority for regional spending, and low law enforcement and poor community behavior in waste management. Efforts made by the Department of the Environment to overcome these problems are to form several programs through waste management methods and waste reduction methods, establish several regulations, cooperate with various parties and give appreciation to employees and environmental activists. It is hoped that with these efforts the performance of the Environmental Service can be maximized. **Keywords:** Performance, Waste Management.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, mengetahui hambatan yang terjadi, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Pada penelitian ini penulis memakai jenis penelitian kualitatif metode deskriptif dan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data yang dipakai dengan melakukan wawancara, observasi secara langsung, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penulis menemukan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah masih kurang baik karena ada beberapa faktor penghambat eksternal dan internal yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu tersebut.. **Kesimpulan:** Hambatan yang dialaminya adalah besarnya jumlah sampah yang

dihasilkan, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kompetensi pegawai, belum memiliki teknologi yang efektif dalam pengelolaan sampah, anggaran yang minim karena dianggap bukan ketetapan prioritas belanja daerah, dan rendahnya penegakan hukum serta buruknya perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah membentuk beberapa program melalui metode penanganan sampah dan metode pengurangan sampah, menetapkan beberapa regulasi, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak serta memberikan apresiasi kepada pegawai dan pegiat lingkungan. Diharapkan dengan upaya tersebut kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat lebih maksimal.

Kata kunci: Kinerja, Pengelolaan Sampah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kerusakan lingkungan seharusnya dapat dicegah dan dikembalikan ke kondisi yang seharusnya apabila dikelola dengan baik sehingga lingkungan kembali bersih dan bebas dari sampah yang berserakan, pencemaran air, dan polusi udara. Lingkungan yang bersih menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat. Sebagaimana amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menjelaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat konstitusi tersebut mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat jika tidak dikelola dengan baik akan menumpuk pada TPA.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya volume jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah yang muncul akibat adanya TPA. Limbah yang dihasilkan akibat adanya TPA mencemari lingkungan sekitar TPA. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat (14) menyebutkan bahwa: “Pencemaran lingkungan hidup yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Mengingat jumlah timbulan sampah di Kabupaten Indramayu setiap tahun meningkat, maka masyarakat beserta Pemerintah harus saling berkolaborasi untuk menangani permasalahan sampah di Kabupaten Indramayu tersebut. Hal ini berdasarkan berita TimesIndonesia, Indramayu. 2021 (diakses pada Rabu, 26 Oktober 2022 pukul 13.30 WIB) yang ditulis oleh Muhammad Jupri pada Jumat, 26 Februari 2021 (<https://www.timesindonesiaco.id/read/news/330146/timbulan-sampah-di-kabupaten-indramayu-setiap-tahun-meningkat>) menerangkan bahwa timbulan sampah di Kabupaten Indramayu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 semakin menunjukkan adanya peningkatan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2021, Kabupaten Indramayu memiliki luas Kabupaten Indramayu mempunyai luas 2.099,42 km² dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat, yang terbagi dalam 31 kecamatan dan 317 desa/kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gantar dengan luas 20.344 ha dari luas Kabupaten Indramayu Sedangkan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Karangampel dengan luas 2.832 ha dari luas Kabupaten Indramayu. Pasal 1 ayat (20) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dikatakan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan berupa pengurangan sampah, dan penanganan sampah.

Dikutip dari berita (Republika.co.id, Indramayu) yang diakses pada Senin, 24 Oktober 2022 pukul 16.42 WIB Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Aep Surahman mengatakan sampah yang dihasilkan masyarakat tinggi, namun instansinya belum mampu menangani terkait sampah secara keseluruhan. Dia menyebutkan pelayanan dalam penanganan sampah baru sekitar 60-70 persen dikarenakan armada dan personilnya terbilang masih kurang. Karena luas wilayahnya, jumlah armada pengangkut sampah yang ideal adalah 150 unit tetapi saat ini jumlah armada pengangkut sampah baru mencapai 50 unit.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat ini. Timbulan sampah yang terus meningkat merupakan salah satu permasalahan tersebut. Mengingat timbulan sampah di Kabupaten Indramayu yang setiap tahunnya meningkat, maka masyarakat beserta pemerintah harus saling berkolaborasi untuk menangani permasalahan sampah di Kabupaten Indramayu tersebut. Hal ini berita TimesIndonesia, Indramayu 2021 yang menerangkan bahwa timbulan sampah di Kabupaten Indramayu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 semakin menunjukkan Adaya peningkatan.

Jumlah armada maupun personil pengangkut sampah sangatlah kurang menjadi permasalahan berikutnya, volume sampah yang ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat di Kabupaten Indramayu tinggi, dan kesadaran masyarakat terhadap sampah juga masih rendah. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, mengatakan sampah yang dihasilkan masyarakat tinggi, namun insansinya belum mampu menangani terkait permasalahan sampah secara keseluruhan. Dia menyebutkan pelayanan dalam penanganan sampah baru sekitar 60-70 persen dikarenakan armada dan personilnya masih terbilang kurang. Karena luas wilayahnya, jumlah armada pengangkut sampah yang ideal adalah 150 unit tetapi saat ini jumlah armada pengangkut sampah baru mencapai 50 unit. Selain itu, jumlah tempat pembuangan akhir (TPA) di Kabupaten Indramayu juga belum ideal.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu dinilai tidak bertanggungjawab terkait sejumlah pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Kabupaten Indramayu yaitu pencemaran yang disebabkan oleh tempat pembuangan akhir (TPA) Pecuk yang menjadi penyebar limbah B3 berbentuk cair yang menggenang dan mengairi sawah milik warga sekitar TPA.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah. Penelitian Irwandy Muzaidi, dkk (2018) yang berjudul Studi Kasus Pencemaran Air Sungai Teluk Dalam Banjarmasin Akibat Limbah Domesik, menemukan bahwa kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup pada saat melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran atau melakukan pengawasan terhadap industri. Dikarenakan jumlah tenaga yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup masih terasa sedikit dibandingkan dengan banyaknya kegiatan industri yang berada di Kota Banjarmasin. Kegiatan industri di Kota Banjarmasin terdapat di 87 lokasi usaha dengan jumlah industri yang melebihi 300-an. Dan pada saat Dinas Lingkungan Hidup ingin melakukan pengawasan terhadap limbah industri yang dihasilkan perusahaan atau suatu usaha tidak jarang Dinas Lingkungan Hidup ditolak oleh pihak pengusaha. Penelitian Martika Dini Syaputri (2017) yang berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas menemukan bahwa pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik namun terkendala berbagai faktor penghambat internal yaitu keterbatasan anggaran dan lahan pengelolaan sampah seperti TPA, jumlah UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah yang cukup efektif dalam pengelolaan sampah baru satu titik saja sehingga belum memadai melayani seluruh

wilayahnya. Penelitian Tangguh Perdana Putra, dkk (2016) yang berjudul Analisis Perilaku Masyarakat Bantaran Sungai Martapura Dalam Aktivitas Membuang Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat menemukan bahwa penelitian tersebut hanya terkhusus pada UPT pengangkutan saja.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu, mulai dari fokus penelitiannya, lokusnya, maksud dan tujuan, teori indikator penulis yakni tentang kinerja berbeda dengan penelitian (Irwandy Muzaidi dkk, 2018) yang berjudul Studi Kasus Pencemaran Air Sungai Teluk Dalam Banjarmasin Akibat Limbah Domesik, dimana penelitian beliau hanya terfokus di UPT Pengangkutan. Jika dibandingkan dengan kajian penulis, maka penelitian penulis lebih luas lagi dari penelitian sebelumnya, jadi penelitian ini mencoba mengembangkan penelitian sebelumnya dengan diperluas kajiannya. Sebagaimana pada penelitian (Martika Dini Syaputri, 2017) hanya terkhusus pada UPT pengangkutan saja, tetapi kajian penulis pada penelitian ini, selain membahas UPT pengangkutan, juga membahas UPT baru yakni UPT Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah sebagai UPT baru dengan paradigma baru dalam pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin. Analisis teori yang digunakan masing-masing penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian penulis berbeda. Pada penelitian (Irwandy Muzaidi dkk, 2018) menggunakan teori kinerja organisasi dari Dwiyanto. Lalu penelitian (Martika Dini Syaputri, 2017) analisis teorinya menggunakan Agus Dwiyanto, dan yang terakhir pada penelitian (Tangguh Perdana Putra dkk, 2016) teori yang digunakannya yaitu teori pengukuran kinerja menurut Armstrong dan Baron. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian penulis baik dari segi analisis teori yang digunakan, konsep penelitian, lokus penelitian, fokus dan tujuan penelitian, serta regulasi yang berlaku.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat serta bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah.

II. METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengambilan data sebagaimana menurut Simangunsong (2016:191) bahwa peneliti sendiri yang mengumpulkan data utama dengan metode observasi, wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu dan dokumentasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang pengelolaan sampah, dinas lingkungan hidup, kinerja pengelolaan sampah, dan program-program kegiatan dalam pengelolaan sampah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu untuk mencapai tujuannya akan mempekerjakan pegawai dengan berbagai perencanaan, salah satunya merencanakan kinerja dalam manajemennya agar dapat mencapai sasaran tujuan organisasi. maka setiap pegawai sesuai perjanjian kerja diharuskan berkinerja tinggi sesuai standar yang telah ditetapkan bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian kinerja menurut Wibowo (2016:2) diartikan sebagai “Kinerja berasal dari pengertian *performance* adapula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja.. Maka kinerja adalah kemampuan melakukan suatu pekerjaan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Kinerja berarti tentang bagaimana

kemampuan atau keahliannya dalam suatu tugas tertentu dengan tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan bersama. Untuk mencapai kinerja kelompok harus memperhatikan keharmonisan kinerja tim, serta perbedaan sudut pandang antara solusi individu dan keputusan kelompok dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, sehingga keberhasilan atau kegagalan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi bergantung pada kemampuan mereka untuk memimpin tim secara keseluruhan. Maka dari itu, setiap unit baik individu, tim, kelompok atau organisasi saling berperan untuk berkinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3.1 Teori yang digunakan

Menurut Dwiyanto dalam Masana Sembiring (2012:98) ada beberapa indikator yang diterapkan dalam mengukur kinerja organisasi yaitu:

a. Produktivitas

- Efisiensi, yaitu berkaitan dengan ketetapan waktu dan biaya pelayanan.
- Efektivitas, yaitu berkaitan dengan capaian dinas dalam menerapkan pengelolaan sampah.

Produktivitas sebagai rasio antara *input* dan *output*. Adanya konsep produktivitas yang masih terlalu sempit setelah itu dikembangkan lebih luas dengan memasukkan seberapa luas pelayanan publik dalam memiliki hasil yang ingin diinginkan adalah bagian dari indikator yang penting.

b. Kualitas Layanan

Ketidakpuasan terhadap kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat mengakibatkan banyak pandangan yang negatif terhadap kualitas pelayanan dari suatu organisasi. Menggunakan indikator kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja memiliki keuntungan yaitu informasi yang didapat sangat efektif dan efisien. Salah satu yang bisa dijadikan parameter untuk menilai kinerja organisasi publik yaitu kepuasan masyarakat. Kinerja suatu organisasi dapat dinilai dengan cara menilai kepuasan masyarakat.

c. Responsivitas

Indikator responsivitas adalah indikator yang menggambarkan kemampuan dari organisasi dalam menjalankan misi dan tujuan khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketidakseimbangan antara pelayanan yang diberikan terhadap kebutuhan suatu masyarakat ditunjukkan oleh responsivitas yang rendah.

d. Responsibilitas

Responsibilitas yaitu terdapat keselarasan pelaksanaan kegiatan dalam organisasi dengan kebijakan yang ada. Responsibilitas akan bisa berbenturan pada saat tertentu dengan responsivitas.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu terdapat konsistensi dari kebijakan organisasi terhadap keinginan masyarakat. Penilaian kinerja tidak hanya dilihat dari faktor internalnya saja melainkan dapat dinilai dari faktor eksternalnya, contohnya adalah nilai atau norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat.

3.2 SOP Pengelolaan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup dituntut menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan dengan menetapkan beberapa regulasi dan strategi dalam pengelolaan sampah, maka disusunlah SOP pengelolaan sampah sebagai berikut:

- a. Penanganan Sampah; Metode konvensional kumpul-angkut-buang yang melayani titik angkut dari beberapa TPS yang terdaftar dengan biaya retribusi atau TPS-TPS liar lalu dibawa ke TPST pada UPT Pengangkutan Sampah masing-masing wilayah seperti UPT pengangkutan sampah untuk dipilah sebelum dibuang ke TPA.

- b. Pengurangan Sampah. Metode edukasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah seperti; penyelesaian sampah organik rumah tangga dengan LCO (Lubang Cerdas Organik) dan sampah anorganik ke bank sampah, setiap individu diwajibkan membawa tumbler dan kantong belanja sendiri.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan penting sisi positif dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu saat ini di bawah kepemimpinan Bupati Kabupaten Indramayu Nina Agustina periode 2021-2026, memiliki beberapa program dan strategi untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia agar dimanfaatkan secara maksimal yakni dengan menetapkan SOP dalam pengelolaan sampah yaitu melalui metode penanganan sampah dan metode pengurangan sampah. membawa paradigma baru dalam pengelolaan sampah yang berbeda, lebih kepada pendekatan perubahan perilaku masyarakat serta lebih kepada edukasi praktek langsung, bagaimana masyarakat sebagai sumber sampah juga sekaligus sebagai sumber solusi. Jika dibandingkan dengan temuan pada penelitian (Tangguh Perdana Putra dkk, 2016) mengenai Analisis Perilaku Masyarakat Bantaran Sungai Martapura Dalam Aktivitas Membuang Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat hasil penelitian lebih kepada masalah pengangkutan sampah dan bagaimana pengelolaan sampah melalui metode konvensional / metode penanganan sampah Berbeda dengan penemuan penelitian penulis, bahwasanya Dinas Lingkungan Kabupaten Indramayu telah meluncurkan dua metode pengelolaan sampah yaitu metode konvensional / penanganan sampah dan metode pengurangan sampah. pada metode penanganan sampah, melalui UPT Pengangkutan Sampah yang terbagi menjadi UPT Pengangkutan Sampah Wilayah Indramayu. Sedangkan untuk metode pengurangan sampah baru terbentuk 1 titik yakni UPT Pengelolaan Sampah di Pecuk. UPT ini sangat menarik dan penting untuk diketahui oleh seluruh OPD di Indonesia agar dapat meniru role model ini. UPT ini masih baru dan tentu masing banyak kekurangan-kekurangan. Sehingga diharapkan dapat terus berkembang dan menjadi paradigma baru dalam pengelolaan sampah kedepannya.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat kinerja dinas ini yakni kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terkait sampah yang masih rendah, dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa jika diukur dari kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu berdasarkan 5 dimensi pengukuran kinerja organisasi pada teori Dwiyanto berjalan kurang baik dikarenakan terdapat kekurangan pada indikator efisiensi, efektivitas, kepuasan masyarakat, tujuan, keselarasan. Pada dasarnya kinerja yang sudah dilakukan sesuai dengan visi Dinas Lingkungan Hidup, hanya saja belum tercapainya target dan realisasi di lapangan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Simangunsong.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Simangunsong, F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

<https://www.timesindonesiaco.id/read/news/330146/timbulannya-di-kabupaten-indramayu-setiap-tahun-meningkat>

Timbulannya di Kabupaten Indramayu Setiap Tahun Meningkat. (Diakses pada 9 September 2022 pukul 10.15).

<https://repjabar.republika.co.id/amp/r65o82396/sungai-jadi-tong-sampah-bupati-nina-ada-kursi-bantal-dan-kasur>

Sungai Jadi Tong Sampah, Bupati Nina: Ada Kursi, Bantal dan Kasur. (Diakses pada 31 Agustus 2022 pukul 16.00)

Irwandy Muzaidi, Elia Anggarini, H. M. P. (2018). Studi Kasus Pencemaran Air Sungai Teluk Dalam Banjarmasin Akibat Limbah Domestik. 16(2).

Martika Dini Syaputri. (2017). Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Brantas. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).

Tangguh Perdana Putra, Sidharta Adyatma, E. N. (2016). Analisis Perilaku Masyarakat Bantaran Sungai Martapura Dalam Aktivitas Membuang Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 3(6), 23–35.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Kabupaten Indramayu tahun 2021

Pertaturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga